

**PENGELOLAAN ARSIP SEJARAH KASULTANAN DAN  
KADIPATEN SEBAGAI PERWUJUDAN KEISTIMEWAAN  
YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**

Ndaru Ramadhan

Prodi D-IV Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran

*Email : ndaru21001@mail.unpad.ac.id*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan dan peran DPAD DIY dalam pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip sejarah Kasultanan sebagai perwujudan keistimewaan kebudayaan Yogyakarta di KHP Widya Budaya terkait pelestarian telah dilakukan secara mandiri, sedangkan pengelolaan arsip Kadipaten masih difasilitasi oleh DPAD DIY. Peran DPAD DIY adalah memfasilitasi pengelolaan arsip dan sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian tersebut diharapkan Kasultanan, Kadipaten, dan DPAD DIY dapat bersinergi untuk mewujudkan keistimewaan kebudayaan Yogyakarta melalui pelestarian arsip-arsip bernilai sejarah yang ada di Kasultanan dan Kadipaten.

**Kata Kunci:** Kasultanan dan Kadipaten; Pengelolaan Arsip Sejarah; Urusan Kebudayaan

***KASULTANAN AND KADIPATEN HISTORICAL ARCHIVES  
MANAGEMENT AS YOGYAKARTA'S SPECIALTIES AFFAIRS***

***Abstract***

*This research aims to find out and analyze how the management of the historical archives of the Kasultanan and Kadipaten is carried out and what the role of the DPAD DIY is in managing the historical archives of the Kasultanan and Kadipaten. The research method in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusions. The research results show that the management of the Kasultanan historical archives as an embodiment of Yogyakarta's special cultural affairs at KHP Widya Budaya related to preservation has been carried out independently. Meanwhile, the management of the Kadipaten archives is still facilitated by DPAD DIY. The role of DPAD DIY is to facilitate the management of archives and human resources. Based on this research, it is hoped that the Kasultanan, Kadipaten, and DPAD DIY will be able to work together to realize Yogyakarta's special cultural affairs through*

*preserving archives of historical value in the Kasultanan and Kadipaten.*

**Keywords:** *Cultural Affairs; Kasultanan and Kadipaten; Management of Historical Archives*

## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, arsip memiliki peranan penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Definisi arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yaitu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Husnita dan Kesuma (2020:28), arsip memiliki tujuan guna melaksanakan penjagaan dokumen sehingga nilai historis instansi dapat ditempatkan pada suatu tempat dan menciptakan kemudahan dalam mencari arsip apabila digunakan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, arsip mampu merekam peristiwa masa lalu dan peristiwa yang baru terjadi (Febrianty & Handayani, 2022:2).

Menurut Basuki (2023:4.9) dalam *Pengantar Ilmu Kearsipan* menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegunaan rekod, salah satunya yaitu rekod sebagai memori badan korporasi. Melalui kegunaan tersebut, arsip atau rekod dapat menjadi rekaman akurat dalam penyediaan informasi dan sebagai dokumentasi. Selain itu, arsip juga berguna sebagai pengingat memori yang memiliki kemungkinan untuk terlupakan karena sulit untuk diingat. Setiap koleksi perlu dirawat dengan baik sehingga koleksi dapat dimanfaatkan oleh pemakai (Sudarsana, 2019:1.3). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolaan terhadap arsip, termasuk arsip yang memiliki nilai sejarah seperti arsip Kasultanan dan Kadipaten.

Nilai historis dari Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari Kraton Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman. Keberadaan Kasultanan dan Kadipaten menyimpan nilai historis yang sangat panjang, mulai dari terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini masih populer. Perjalanan panjang sejarah perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta mewariskan banyak arsip, dokumen, hingga peninggalan sejarah yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Arsip yang berasal dari Kraton Ngayogyakarta (Kasultanan) dan Pura Pakualaman (Kadipaten) disebut sebagai arsip yang bernilai sejarah tinggi dikarenakan arsip

tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri. Hal tersebut menjadikan arsip Kasultanan dan Kadipaten menjadi warisan budaya.

Peraturan yang mengatur kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan. Lima kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam urusan keistimewaan, antara lain: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, (2) kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, (3) kebudayaan, (4) pertanahan, dan (5) tata ruang. Pengelolaan arsip Kasultanan dan Kadipaten merupakan realisasi dari kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam urusan keistimewaan yaitu urusan kebudayaan, sehingga pengelolaan arsip Kasultanan dan Kadipaten menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya menguatkan nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Suhardo (2022:38) mengatakan bahwa arsip memiliki peran penting dalam menyokong Yogyakarta sebagai daerah istimewa dikarenakan arsip dapat digunakan sebagai bukti dari peristiwa masa lalu terkait kehidupan budaya, sosial politik, dan ekonomi.

Peran Kasultanan Ngayogyakarta, Kadipaten Pakualaman, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPAD DIY) diperlukan untuk dapat menjalankan salah satu kewenangan yang terkait dengan arsip. Peran yang dapat dilakukan oleh Kasultanan dan Kadipaten adalah dengan menyediakan arsip yang dimiliki dan pemeliharaan arsip sejarah. Peran lain dapat dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bidang pengelolaan arsip statis, berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berperan dalam melaksanakan fasilitasi pelestarian arsip statis Kasultanan dan Kadipaten serta fasilitasi pengelolaan kearsipan statis Kasultanan dan Kadipaten.

Terkait peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengelolaan arsip Kasultanan dan arsip Kadipaten, dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten. Merujuk pada peraturan gubernur tersebut, terdapat tiga fasilitasi penyelenggaraan kearsipan di Kasultanan dan Kadipaten yaitu (1) pengelolaan

kearsipan, (2) sumber daya manusia, dan (3) sarana dan prasarana.

Penelitian terdahulu yang membahas terkait pengelolaan arsip Kasultanan dan Kadipaten yaitu Putranto, Ardani, dan Mayzana (2022:14-16) dalam *Restorasi Arsip di Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widyabudaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat* menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan restorasi di KHP Widyabudaya berupa jumlah konservator dan infrastruktur yang terbatas. Selain itu, terdapat permasalahan terkait target restorasi setiap tahun yang jarang tercapai. Beberapa penelitian lain menyebutkan adanya kendala terkait pengelolaan arsip. Permana dan Rohmiyati (2017) dalam *Analisis Preservasi Arsip Statis Tekstual Sebagai Upaya Pelestarian Arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati* mengatakan bahwa preservasi arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati mengalami beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang terbatas, keterbatasan anggaran, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kendala terkait kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia juga terjadi pada proses preservasi arsip di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Hidayah & Saufa, 2019:49).

Berdasarkan pada beberapa kendala yang disampaikan dalam hasil penelitian terdahulu, sehingga topik terkait pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Peneliti mengkaji mengenai (1) Bagaimana pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten sebagai perwujudan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan dilaksanakan dan (2) Bagaimana peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten sebagai perwujudan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten dilaksanakan dan bagaimana peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten.

Upaya untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, digunakan metode penelitian yang terukur. Metode penelitian adalah cara ilmiah dengan kebermanfaatan tertentu yang ditujukan untuk memperoleh data (Sugiyono, 2013:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:9) metode penelitian kualitatif diimplementasikan apabila peneliti ingin memperoleh data

yang dalam dan bermakna. Pendekatan deskriptif dipilih agar penelitian terkait sebuah fenomena dapat terperinci (Siyoto & Sodik, 2015:11). Subjek dalam penelitian ini yaitu arsiparis mahir di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekaligus merangkap menjadi Abdi Dalem di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya di Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widya Budaya. Selain arsiparis mahir, subjek yang ada dalam penelitian ini yaitu arsiparis muda di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan objek penelitian yaitu pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten di Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widya Budaya.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan langsung dari informan yaitu arsiparis mahir dan arsiparis muda, sedangkan sumber data sekunder didapat dari studi literatur berupa dokumen resmi dari instansi pemerintahan, jurnal, dan buku. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2013:241) dalam *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* mengatakan bahwa apabila teknik pengumpulan data triangulasi diimplementasikan, maka data yang didapat oleh peneliti lebih tuntas, konsisten, dan pasti. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengelolaan Arsip Sejarah Kasultanan dan Kadipaten Sebagai Perwujudan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**

Pelaku pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten dapat digolongkan menjadi tiga yaitu Kasultanan, Kadipaten, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPAD DIY). Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memiliki peran dalam penyediaan dan perawatan arsip yang memiliki nilai sejarah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran dalam melakukan pengelolaan arsip yang memiliki nilai sejarah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya semata-mata melakukan pengelolaan arsip yang memiliki nilai sejarah namun harus memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten dan sebagai perwujudan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan.

Arsip bernilai sejarah yang disimpan oleh Kasultanan Ngayogyakarta

Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman berusia puluhan hingga ratusan tahun. Putranto, Ardani, dan Mayzana (2022:3) dalam *Restorasi Arsip di Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widyabudaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat* menjelaskan bahwa terdapat beberapa keunikan yang ada dalam arsip bernilai sejarah. Keunikan tersebut antara lain arsip ditulis menggunakan ejaan lama, terdapat tanda tangan dari raja, menggunakan logo dan cap timbul, hingga jenis kertas yang digunakan pada arsip tidak seluruhnya masih diproduksi dan dipakai sampai sekarang. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari arsiparis mahir Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Abdi Dalem di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya:

“Arsip zaman Danurejo itu di sini juga banyak. Jadi, sebagian besar e masih tulisan tangan” (MAP, 15/08/2023).

Kondisi arsip saat ini sudah mengalami beberapa kerusakan mengingat usianya yang sudah tua. Beberapa kategori kerusakan arsip kertas yang menjadi dasar identifikasi dan penilaian kerusakan, antara lain: kerusakan pada jilidan dan blok teks, kerusakan karena kimia, kerusakan karena mekanis, kerusakan karena hama, dan kerusakan karena air. Kerusakan pada arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten juga tidak dapat dihindari. Arsiparis mahir Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa:

“Kalau di Kraton biasanya karena tinta, korosi tinta. Jadi karena kan opo masih pakai itu jadi pakai tulisan itu. Jadi dulu mungkin pakai pen atau apa itu. Jadi kalau yang opo yang udah pakai ketik dan sebagainya itu aman. Tapi kalau yang masih pakai tulisan tangan itu biasanya kerusakannya di anu tintanya. Jadi berlubang-lubang itu. Jadi umpama oh yang pas tulisannya udah udah korosi ya mungkin terus lepas cuma jadi lingkaran huruf-huruf yang lain juga kayak gitu. Cuma sini juga banyak yang kayak gitu” (MAP, 15/08/2023).

Pernyataan tersebut kemudian didukung dengan pernyataan arsiparis mahir terkait korosi tinta.

“Korosi tinta kan ini. Kalau pas garis patah. Pas garis patah. Kadang-kadang tulisannya sebenarnya masih bagus, tapi ada tulisannya yang sudah rusak. Coklat-coklat ini udah mulai anu udah mulai korosi. Uдах pada lubang ini, ini udah pada hilang. Pas garis itu berlubang. Nanti kalau udah nyemplong-nyemplong itu tulisannya udah hilang. Kalau yang informasinya udah hilang ya udah, udah pada lubang itu” (MAP, 15/08/2023).

Kedua pernyataan terkait korosi tinta juga dijelaskan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kerusakan Arsip Kertas mengenai pengertian korosi tinta yaitu kerusakan pada arsip kertas yang diakibatkan oleh penggunaan atau kandungan logam pada

tinta.

Saat ini, proses preservasi arsip di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya dilakukan secara mandiri di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya dengan fasilitasi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk pengelolaan arsip bernilai sejarah di Kadipaten masih difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut senada dengan pernyataan Arsiparis Mahir bahwa:

“Terus karena Kraton sudah bisa melaksanakan sendiri, ya untuk Kraton udah mandiri. Jadi tidak dibawa ke Arsip Nasional. Terus untuk yang Pakualaman karena sana belum melaksanakan ya masih kita fasilitasi” (MAP, 15/08/2023).

Menurut Satriawan dan Prakosa (2020:74) dalam *Institutional Disputes Settlement Mechanism of Succession in Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate*, Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya merupakan salah satu bidang dari Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya (KHP Nitya Budaya) yang dipimpin oleh GBPH Prabukusumo selaku saudara laki-laki dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan didampingi oleh GKR Bendara selaku anak perempuan kelima dari Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya memiliki tugas untuk mengurus upacara adat yang ada di Kasultanan seperti labuhan dan grebeg. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arsiparis Mahir bahwa:

“Jadi beliau-beliau ini dulu kan spesialis yang e opo upacara adat itu lho, Mas. Jadi kalau grebeg, labuhan jadi tugasnya sini. Jadi yang buat gunung itu ini. Yang ngeracik yang grebeg gunung itu yang buat ini dari opo bahannya dibuat itu penthul dan apa itu. Terus sini juga ada acara labuhan labuhan juga ke sini. Terus siraman pusaka barang itu difasilitasi di itu peralat-peralatan kalau upacara adat itu ada untuk apa siraman pusaka alatnya dari sini semua” (MAP, 15/08/2023).

Abdi Dalem yang bertugas di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya merupakan Abdi Dalem yang berasal dari berbagai kalangan. Arsiparis Mahir menyatakan bahwa:

“Jadi abdi dalem yang kalau ini kan dari berbagai kalangan. Kalau ini dulu dukuh di Wonosari sana. Itu ada yang petani. Terus itu ada yang tukang becak. Dia baca tulis tidak bisa tapi Bahasa Inggrisnya lancar. Tapi anunya opo istilahnya cuma apa ya bahasa percakapan sehari-hari komunikasi. Padahal dia baca tulis tidak bisa. Dia denger dan anu kan maksudnya itu mungkin karena terbiasa” (MAP, 15/08/2023).

Selain itu, Abdi Dalem di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya juga sudah berumur tua. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Arsiparis Mahir

bahwa:

“Jadi abdi dalem kan udah sepuh-sepuh ini kan baru-baru barusan aja. Mungkin baru dua tiga tahun lalu yang ini yang muda-muda. Tadi malah banyak sarjana-sarjana. Spesifikasinya kan opo ada yang sejarah, sastra Jawa, yang opo biasanya anak filologi itu kan yang bisa baca tulis Jawa” (MAP, 15/08/2023).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Abdi Dalem di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya terdiri dari berbagai golongan dan kebanyakan dari Abdi Dalem sudah tua. Sedangkan untuk petugas di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya selain Abdi Dalem merupakan lulusan sarjana dengan konsentrasi sejarah, sastra Jawa, hingga filologi. Arsiparis Mahir juga menjelaskan mengenai kendala terkait sumber daya manusia yang ada di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya bahwa:

“Nyuwun sewu ya untuk pemahaman mereka ini kan kurang, eksekusinya juga beda” (MAP, 15/08/2023).

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan program magang terkait preservasi arsip seperti yang dikatakan oleh Arsiparis Mahir berikut.

“Dulu awalnya magang di DPAD juga. Magang dulu di sana satu minggu. Jadi anune sama untuk prosesnya” (MAP, 15/08/2023).



**Gambar 1.** Preservasi Arsip Oleh Abdi Dalem  
*Sumber: Olahan Penulis, 2023*

Dari pernyataan tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan preservasi arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya sama. Tetapi, menurut penjelasan Arsiparis Mahir, pada tahun 2009 hingga 2011 terdapat

kegiatan pelestarian arsip oleh Jerman sehingga terdapat satu proses yang menarik yaitu proses *freezing*.

“Ini dulu dari itu dari Jerman itu. Jadi dulu ada kegiatan opo untuk pelestarian arsip di sini. Jadi nanti setelah direstorasi nanti dipress biar nanti opo lurus rapih atau mungkin arsipnya ada yang bergelombang lalu dipress setelah selesai tapi setelah dilepas dari plastiknya. Setelah itu baru dipotong di sini. Jadi opo untuk itu pas digunakan pas itu ada proyek dari Jerman itu tiga tahun 2009 sampai 2011. Jadi dulu ada kegiatan digitalisasi, restorasi, sama kodikologi, ada tiga kegiatan. Jadi naskah-naskah ini kan sebagian besar udah bentuknya udah anu udah digital. Kalau arsip baru opo juga baru proses. Kalau yang naskah udah selesai” (MAP, 15/08/2023).

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, *freezing* merupakan salah satu metode pengendalian hama perusak arsip dengan menggunakan non-bahan kimia. Arsiparis Mahir menjelaskan tahapan proses *freezing* sebagai berikut.

“Jadi freezer itu kan dulu untuk anu, Mas jadi untuk perawatan juga. Jadi naskah itu selain tadi ada fumigasi, termite control juga ada namanya *freezing*. Jadi nanti naskah itu apa arsip itu ditaruh dalam plastik, jadi plastik itu kedap udara. Jadi nanti ada divakum itu, baru dipress. Jadi kayak anu buah opo makanan yang opo e di pendingin itu lho, kayak naget kayak opo sosis barang kae lho, kedap udara to itu kayak itu persis. Jadi dimasukkan dalam itu tiga hari opo dalam freezer itu terus dimatikan terus nanti mbukak tiga hari lagi baru dibuka. Terus dilepas dari plastiknya itu. Itu fungsinya untuk kalau yang opo kayak fumigasi itu yang mati cuma yang masih yang hidup. Jadi induknya dan sebagainya itu yang mati. Tapi kalau telur kalau difumigasi itu tetep masih hidup. Jadi nanti waktunya netas ya netas. Tapi kalau dengan freezer ini, itu mati. Jadi telur-telurnya mati” (MAP, 15/08/2023).



**Gambar 2.** Mesin Freezing  
Sumber: *Olahan Penulis, 2023*

Tetapi, kendala terkait sumber daya manusia menjadikan proses *freezing*

tidak dapat berjalan lancar di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya. Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan Arsiparis Mahir berikut ini.

“Ini juga nda pernah digunakan makanya sekarang untuk buat es itu. Itu repot tadi, Mas. Ya kadang-kadang e yaitu tadi aduh kan SDM nya” (MAP, 15/08/2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa mesin *freezing* yang semula dipergunakan untuk proses *freezing* arsip, dialihfungsikan karena kendala sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi jumlah maupun kompetensinya.

**B. Peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Arsip Sejarah Kasultanan dan Kadipaten Sebagai Perwujudan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**

Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten meliputi:

a. Pengelolaan kearsipan; b. Sumber daya manusia; dan c. Sarana dan prasarana. Fasilitasi penyelenggaraan kearsipan di Kasultanan dan Kadipaten tersebut dapat dilakukan melalui fasilitasi aktif dan fasilitasi pasif. Fasilitasi aktif yaitu fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui DPAD DIY atas persetujuan Kasultanan dan/atau Kadipaten, sedangkan fasilitasi pasif yaitu fasilitasi atas inisiatif dari Kasultanan dan/atau Kadipaten untuk melibatkan DPAD DIY selaku unit kearsipan Pemerintah Daerah DIY dalam penyelenggaraan kearsipan di Kasultanan dan/atau Kadipaten (Pergub No. 81 Tahun 2022).

Sebelum Kasultanan melaksanakan pengelolaan arsip secara mandiri, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan fasilitasi bagi Kasultanan dan Kadipaten seperti yang dikatakan oleh Arsiparis Mahir berikut.

“Kalau dulu pernah kita opo sebelum melaksanakan sendiri, kita bawa ke Arsip Nasional juga. Jadi kita ambil dari sana dengan berita acara serah terima. Terus nanti kita bawa ke sini, terus pas jadwal ke Arsip Nasional kita bawa ke sana. Setelah selesai nanti kita serahkan kembali lagi sesuai jadi di berita acara kan ada daftarnya. Ada daftarnya sejumlah berapa lembar nah nanti kita kembalikan sejumlah sesuai daftar yang kita ambil dulu” (MAP, 15/08/2023).

**Tabel 1.** Jumlah Arsip Kasultanan dan Kadipaten yang Difasilitasi ke Arsip Nasional (ANRI) Tahun 2019 hingga Tahun 2023

Tahun Anggaran	Jumlah Arsip
2019	28.440 Arsip tekstual
2020	Tidak Ada Fasilitasi ke Anri
2021	Tidak Ada Fasilitasi ke Anri
2022	12.177 Arsip tekstual
2023	22.000 Arsip tekstual

*Sumber: Arsiparis Muda Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, 2023*

Terkait fasilitasi pengelolaan kearsipan, selain memfasilitasi preservasi ke Arsip Nasional, Arsiparis Mahir juga menjelaskan bahwa:

“Jadi di Kraton itu kan tidak hanya arsipnya yang difumigasi, tapi barang-barang koleksi juga karena dulu apa banyak mungkin pigura, lukisan dan sebagainya dimakan rayap, nah itu juga harus difumigasi. Jadi ini dari Kraton kan kita juga ada fasilitasi untuk fumigasi juga di sana. Pengolahan dan alih media, kalau yang dari sini, pengolahan dan alih media” (MAP, 15/08/2023).

Arsiparis Mahir juga menjelaskan mengenai fasilitasi sumber daya manusia dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya.

“Terus kalau untuk yang petugas alih media itu ada dua orang, untuk pengolahan ada lima orang. Terus kalau untuk e opo untuk restorasi e mandiri sana sendiri. Jadi tidak ada fasilitasi dari sini. Cuma untuk fasilitasi SDM aja. Jadi kita cuma mendampingi” (MAP, 15/08/2023).

Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh pernyataan berikutnya dari Arsiparis Mahir bahwa:

“Jadi di sini ada banyak tim. Jadi kalau yang dari DPAD cuma itu tadi yang di pengolahan itu lima orang terus alih media yang arsip sama yang sana perpustakaan. Perpustakaan itu juga dari DPAD juga” (MAP, 15/08/2023).

Sedangkan untuk fasilitasi sarana dan prasarana, Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya sudah memiliki sendiri. Sehingga Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melaksanakan fasilitasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arsiparis Mahir berikut.

“Untuk sarpras pengadaan dari sana sendiri” (MAP, 15/08/2023).

Terkait penganggaran, Arsiparis Mahir menyatakan bahwa Kasultanan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan untuk fasilitasi kearsipan. Hal tersebut dijelaskan oleh Arsiparis Mahir pada saat diwawancara mengenai penganggaran.

“Sebenarnya anggarannya juga sama dari dana keistimewaan, kita juga dari dana keistimewaan. Cuma sana menganggarkan sendiri, kita juga. Jadi karena dia sudah bisa menganggarkan ya daripada nanti istilahnya toh sumber sama juga dari dana keistimewaan itu” (MAP, 15/08/2023).

Secara keseluruhan, anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel Perbandingan Anggaran Tahun 2019 hingga Tahun 2022 berikut.

**Tabel 2.** Perbandingan Anggaran Tahun 2019 hingga Tahun 2022

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
2019	Rp. 34.793.858.146,00
2020	Rp. 22.202.840.172,00
2021	Rp. 57.753.452.131,00
2022	Rp. 47.416.886.994,00

*Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2019 hingga Tahun 2022*

Sedangkan untuk anggaran pengelolaan arsip Kasultanan dan Kadipaten, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan seperti pada Tabel 3. Tabel Perbandingan Anggaran Pengelolaan Arsip Sejarah Kasultanan dan Kadipaten Tahun 2020 hingga Tahun 2022 berikut ini.

**Tabel 3.** Perbandingan Anggaran Pengelolaan Arsip Sejarah Kasultanan dan Kadipaten Tahun 2020 hingga Tahun 2022

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
2020	Rp. 3.261.818.000,00
2021	Rp. 20.587.823.600,00
2022	Rp. 5.771.902.011,00

*Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2019 hingga Tahun 2022*

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan sebesar Rp. 3.261.818.000,00 untuk Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten dengan kegiatan berupa Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten pada tahun anggaran 2020. Pada tahun anggaran 2021, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan sebesar Rp. 20.587.823.600,00 untuk Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan subkegiatan berupa Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten dan subkegiatan berupa Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya. Sedangkan pada tahun anggaran 2022, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan sebesar Rp. 5.771.902.011,00.

Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan fungsi di bidang pelayanan arsip. Bidang layanan

arsip bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan arsip baik arsip Kasultanan, Kadipaten, maupun arsip lainnya untuk keperluan informasi sejarah dan pengetahuan. Jumlah pemanfaatan arsip Kraton dan Puro mulai tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel Jumlah Pemanfaatan Arsip Kraton dan Puro Tahun 2019 hingga Tahun 2022 berikut ini.

**Tabel 4.** Jumlah Pemanfaatan Arsip Kraton dan Puro Tahun 2019 hingga Tahun 2022

Tahun		Jumlah Arsip
2019	Kraton	377
	Puro	407
2020	Kraton	85
	Puro	98
2021	Kraton	64
	Puro	73
2022	Kraton	19
	Puro	50

*Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2019 hingga Tahun 2022*



**Gambar 3.** Ruang Layanan Arsip DPAD DIY

*Sumber: Olahan Penulis, 2023*

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengelolaan arsip sejarah Kasultanan sebagai perwujudan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya terkait preservasi telah dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan untuk pengelolaan arsip Kadipaten masih difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten sebagai perwujudan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yaitu fasilitasi pengelolaan kearsipan berupa pengolahan arsip, alih media, dan fumigasi. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan fasilitasi sumber daya manusia di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya.

### **B. Saran**

Melalui penelitian dengan topik pengelolaan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten ini diharapkan baik Kasultanan, Kadipaten, maupun Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat bersinergi dalam mewujudkan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan melalui pelestarian arsip bernilai sejarah di Kasultanan dan Kadipaten. Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan arsip bernilai sejarah, maka diperlukan upaya peningkatan kompetensi seperti magang dan *workshop* untuk Abdi Dalem di Kawedanan Hageng Punakawan Widya Budaya dan Kadipaten.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kerusakan Arsip Kertas.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Basuki, S. (2023). Pengantar Ilmu Kearsipan (4th ed.). Universitas Terbuka.
- Febriyanti, N., & Handayani, N. S. (2022). Analisis Pengelolaan Arsip Dinamis Sebagai Bahan Informasi yang Autentik: Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, 6(1), 1-16. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.83459>.
- Hidayah, Nurrohmah & Saufa, Arina F. Preservasi Digital Arsip Naskah Kuno: Studi Kasus Preservasi Arsip di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)* Vol. 4 No. 1

Tahun 2019 ISSN (online): 2528-021X.

Husnita, Tri J. & Kesuma, Mezan. Pengelolaan Arsip Sebagai Sumber Informasi Bagi Suatu Organisasi Melalui Arsip Manual dan Arsip Digital. *El Pustaka: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam* 01 (02): 27-41 (2020) DOI: <https://doi.org/10.24042/el%20pustaka.v1i2.8503>.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2022.

Permana, Rio & Rohmiyati, Yuli. Analisis Preservasi Arsip Statis Tekstual Sebagai Upaya Pelestarian Arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, vol. 6, no. 3, pp. 71-80, Feb. 2019.

Putranto, WA., Ardani, MF. Mayzana, RDS. Restorasi Arsip di Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widyabudaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. *Khazanah Jurnal Pengembangan Kearsipan*, Vol 15 (1). 2022.

Satriawan, Iwan & Prakosa, Faishal A. Institutional Disputes Settlement Mechanism of Succession in Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 5, Number 1, 2020, P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274, DOI: <https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.94/>

Siyoto, Sandu & Sodik, MA. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sudarsana, U. (2019). *Preservasi dan Konservasi Media Informasi*. Universitas Terbuka.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suhardo. (2022). Analisis Pelayanan Arsip Statis di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, 6(1), 37-56. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.83187>.